

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan, pembahasan, dan analisis yang telah dipaparkan dalam bab IV diperoleh data dan fakta yang ada di lapangan, sehingga pada bab V peneliti akan menarik kesimpulan umum berdasarkan kajian masalah penelitian mengenai penyelenggaraan pendidikan formal di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bandung. Selain itu, pada bab V penulis juga akan memaparkan implikasi dan rekomendasi yang bertujuan untuk bahan pertimbangan dan masukan pada pihak yang berkaitan dengan penelitian.

5.1 Simpulan

5.1.1. Simpulan Umum

Berdasarkan temuan dan analisis dapat diperoleh simpulan secara umum mengenai penyelenggaraan pendidikan formal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung, yaitu :

Diselenggarakannya pendidikan formal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung ini adalah sebagai tindak lanjut dari adanya perubahan Undang-undang Sistem Peradilan Anak Undang-undang RI No. 11 tahun 2012. Perubahan undang-undang ini menjadikan proses pembinaan yang ramah anak sehingga Hak-hak anak juga harus dipenuhi, seperti Hak untuk mendapatkan pendidikan. LPKA Bandung memberikan layanan pendidikan di Sekolah taruna wiyata mandiri yang didirikan pada 05 Agustus, jenjang pendidikan difokuskan pada jenjang SMP dan SMA, SMK karena anak-anak di LPKA Bandung didominasi oleh anak yang berada di usia sekolah SMP dan SMA. Pihak LPKA berkerjasama dengan dinas pendidikan Jawa Barat untuk menunjuk sekolah yang akan menjadi induk dari Sekolah Taruna Wiyata Mandiri. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan mulai pukul 09.00 hingga pukul 12.00 setiap hari kerja kecuali hari Rabu, namun pada kenyataannya kegiatan ini tidak terlaksana sebagaimana yang telah dijadwalkan, karena kurangnya tenaga pengajar menyebabkan kegiatan belajar mengajar di kelas disesuaikan dengan

sibuk tidaknya pengajar di sekolah induk, namun ketika ujian semester yang dijadwalkan sesuai dengan jadwal disekolah induk guru akan datang untuk mengawas peserta didik, hasil dari penyelenggaraa pembelajaran ini adalah anak didik permasarakatan pada jenjang SMP dan SMA sudah memiliki ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah induk, ijazah tersebut didiapat dengan ikut sertanya anak didik permasyarakatan dalam Ujian Nasional di sekolah induk dengan pengawalan dari pihak LPKA, dan anak didik permasyarakatan berhasil lulus 100 %.

5.1.2. Simpulan Khusus

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang terdapat pada bab 1 yaitu:

1. Perencanaan pelaksanaan pendidikan formal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung dirumuskan dalam Undang-undang No 11 tahun 2012, yang meyakini bahwa anak didik permasyarakatan harus diberikan pendidikan formal untuk bekal kembali kemasyarakat, sehingga untuk menidaklanjuti keputusan tersebut Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung berkerjasama dengan dinas pendidikan Jawa Barat sehingga bentuk pendidikan formal yang terapkan adalah pendidikan layanan khusus, yang segala perencanaan dan pelaksanaanya disesuaikan dengan keadaan peserta didik, untuk SMP menginduk ke SMP 8 Bandung, SMA menginduk ke SMA Langlangbuana Bandung, serta untuk SMK pertanian menginduk ke SMK PP Lembang, dan jurusan otomotif menginduk ke SMK PU Negri Bandung. kerja sama ini menghasilkan beberapa perencanaan seperti jadwal diselenggarakan kegiatan belajar mengajar adalah setiap hari kecuali rabu dan minggu mulai pukul 09.00 hingga 12.00, guru yang mengajar didatangkan langsung dari sekolah induk atau guru Bina yang dibantu oleh beberapa petugas LPKA guru Pamong, evaluasi hanya diberikan didalam kelas serta evaluasi semester mengikuti jadal dari sekolah induk, serta modul dan buku-buku penunjang pemelajaran didapat dari pemerintah daerah melalui sekolah induk.

Kurniawati Gunardi, 2017

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (Studi Deskriptif pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kurikulum yang digunakan di LPKA adalah kurikulum fleksibel yang disesuaikan antara kurikulum sekolah induk dan keadaan di LPKA.

2. Dalam implementasinya, pelaksanaan pendidikan di LPKA banyak yang tidak sesuai dengan perencanaan awal, jika perencanaan KBM dilaksanakan setiap hari kecuali hari Rabu dan Minggu, pada kenyataannya kegiatan belajar mengajar hanya dilakukan beberapa kali dalam satu bulan, hal ini peneliti temukan saat melihat agenda mengajar yang ada di sekolah wiyata mandiri, untuk jenjang pendidikan SMP, dalam satu bulan pertemuan yang paling banyak berada pada bulan september 2016 yaitu sebanyak 9 kali pertemuan tatap muka, dan pada bulan desember 2016, januari 2017 dan Februari 2017 tidak ada 1 kalipun pertemuan, Untuk SMA pertemuan terbanyak ada di bulan Februari 2017 yaitu 16 kali pertemuan, dan untuk SMK jumlah pertemuan terbanyak berada pada bulan september 2016 yaitu sebanyak 14 kali pertemuan, saat peneliti mengkonfirmasi kepada pengajar alasan utama tidak adanya pengajaran adalah kesibukan pengajar di sekolah induk. Guru atau pendidik ditunjuk langsung oleh kepala sekolah untuk membantu terselenggaranya pendidikan bermutu di LPKA namun pada kenyataannya guru bina belum maksimal dalam memberikan pengajaran bagi anak didik permasyarakatan, selain itu guru pamong yang berasal dari LPKA juga tidak dapat melaksanakan tugas mengajar dengan baik karena guru pamong yang ditunjuk tidak hanya bertugas memberikan pengajaran kepada anak didik permasyarakatan. Peneliti merasa evaluasi yang diberikan oleh anak didik permasyarakatan sesuai dengan keadaan anak, sehingga perencanaan dan penyelenggaraan evaluasi sudah berjalan dengan baik. Sekolah wiyata mandiri sangat memerlukan buku penunjang pembelajaran, perencanaan awal tidak berjalan dengan baik karena pendistribusian buku yang sangat lama menyebabkan anak didik permasyarakatan tidak memiliki buku penunjang pembelajaran yang cukup. Peneliti merasa tujuan utama dilaksanakan pendidikan formal di LPKA sudah sesuai dengan perencanaan awal, seluruh anak pada usia sekolah mengikuti proses pembelajaran.

Kurniawati Gunardi, 2017

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (Studi Deskriptif pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. Bentuk evaluasi pendidikan yang diterapkan oleh guru sama halnya seperti yang ada di sekolah reguler, berupa lisan dan tertulis, namun tingkat kesulitan soal berbeda, selain itu evaluasi berupa tugas mandiri, PR jarang diberikan karena kesulitan siswa dalam melakukan belajar mandiri diluar jam pelajaran. Untuk siswa SMP nilai rata-rata siswanya dilihat dari rapot siswa adalah 76 dengan KKM 72, untuk SMA nilai rata-rata siswanya 75 dengan KKM 70 serta siswa SMK memiliki nilai rata-rata 79 dengan KKM 70. Walaupun tidak terlalu bagus, namun anak didik permasyarakatan mendapatkan nilai diatas KKM, selain itu untuk ujian nasional beberapa siswa SMP, SMA dan SMK disekolah wiyata mandiri berhasil lulus dan mendapatkan ijazah yang dikeluarkan langsung dari sekolah induk.
4. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan formal di LPKA adalah kurangnya tenaga pendidik, sehingga proses belajar mengajar tidak dapat dilakukan secara maksimal, tenaga pengajar yang sudah ditunjuk oleh sekolah untuk mengajar di LPKA tidak datang sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sebelumnya, selain itu anak didik permasyarakatan yang sudah bebas banyak yang tidak mau kembali untuk mengikuti ujian dan pihak LPKA tidak dapat memaksa karena anak sudah tidak terikan lagi dengan LPKA. Akibat dari distribusi buku yang sangat panjang menyebabkan buku pelajaran sangat minim, selain itu kendala yang dihadapi tenaga pengajar adalah membagi waktu anatara sekolah induk dan sekolah wiyata mandiri menjadi hal tersulit yang dihadapi guru, selain itu kondisi LPKA dimana anak didik permasyarakatan setiap hari bertambah menyebabkan agak sulit dalam proses mengajar.

1.2.1 Upaya yang dilakukan, untuk kendala kurangnya tenaga pendidik yang mengajar di LPKA dengan megirimkan surat usulan dan teguran untuk sekolah-sekolah yang jarang mengajar, untuk sisiwa yang tidak mau kembali untuk ujian, pihak LPKA akan memberikan pemahaman dengan maksimal sebelum anak bebas. Untuk tenaga pendidik, upaya yang dilakukan adalah menyusun jadwal ulang yang tidak merugikan siswa maupun tenaga penddik, dan guru selalu memberikan penjelasan

Kurniawati Gunardi, 2017

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (Studi Deskriptif pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

ulang sebelum memulai materi baru, dan menyarankan anak yang terlambat mengikuti pembelajaran dapat bertanya kepada temannya.

5.2 Implikasi

Hasil penelitian ini membawa implikasi bagi beberapa instansi sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa Program Pendidikan Sosiologi, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi dan sarana menambah wawasan konsep keilmuan mengenai pelaksanaan pendidikan formal di lembaga pendidikan formal di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bandung sehingga kajian ilmu kependidikan ini dapat diterapkan dalam pembelajaran dan perkuliahan mengenai pendidikan bagi anak nakal.
2. Bagi lembaga yang diteliti hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung untuk tetap memberikan sumbangan yang bermakna untuk lebih meningkatkan fungsi pendidikan formal untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak didik masyarakat sehingga dapat menjadi insan yang berkualitas dan berpendidikan.
3. Bagi anak didik masyarakat, penelitian ini mampu memberikan motivasi bagi anak didik masyarakat untuk lebih semangat dalam mengikuti pendidikan formal di LPKA serta mengaplikasikan nilai-nilai yang telah ditetapkan selama masa pembinaan dalam kehidupan sehari-hari.
4. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana pelaksanaan pendidikan formal di Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bandung.
5. Bagi orangtua penelitian ini dapat menjadi referensi ilmu baru dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum.
6. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat membantu menambah referensi dalam penelitian selanjutnya mengenai pola pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang penyelenggaraan pendidikan formal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung dalam meningkatkan APK dan APM serta menekan angka putus sekolah, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

5.3.1. Masyarakat

Masyarakat hendaknya mendukung setiap program pembinaan yang sudah dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan khusus anak dengan tidak mengucilkan warga binaan yang telah menyelesaikan masa pidananya. Masyarakat diharapkan dapat merangkul dan memberikan dorongan kepada anak didik permasyarakatan yang telah selesai masa pidananya sehingga warga binaan dapat beradaptasi dengan baik dalam masyarakat dan tidak kembali ke mengulangi tindak kejahatan yang dapat menyebabkan dirinya kembali ke Lembaga Pemasyarakatan.

5.3.2. Kementerian Hukum dan HAM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai program pembinaan sekolah formal di LPKA Kelas II Bandung, sehingga dengan diberikannya pendidikan bagi anak yang berurusan dengan hukum dapat menyelamatkan masa depan anak, beberapa kendala yang telah dijelaskan dalam penelitian ini dapat membantu pihak Kementerian Hukum dan HAM agar mencari upaya yang lebih baik sehingga dapat membantu terselenggaranya pendidikan formal yang lebih baik lagi. Serta lebih memperhatikan pendidikan bagi anak yang berurusan dengan hukum lainnya yang ada di Jabar agar segera dipindahkan ke LPKA Bandung, selain itu pendidikan bagi anak perempuan yang berurusan dengan hukum sebaiknya dicarikan solusinya agar dapat menempuh pendidikan sebagaimana anak laki-laki di LPKA Kelas II Bandung.

5.3.3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung

Selaku pelaksana fungsi pendidikan untuk anak yang berhadapan dengan hukum, Lembaga Pembinaan Khusus Anak diharapkan dapat terus meningkatkan program pendidikan, dalam pelaksanaan pendidikannya juga harus menetapkan

Kurniawati Gunardi, 2017

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (Studi Deskriptif pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sanksi bagi tenaga pendidik yang jarang datang sehingga proses belajar mengajar dapat terlaksana sebagaimana umumnya, selain itu untuk anak didik permasyarakatan yang telah bebas, sebaiknya pihak LPKA masih bertanggung jawab untuk pendidikannya sampai anak tersebut benar-benar diterima di sekolah reguler lainnya. Selain itu sebgainya disediakan tenaga pengajar dari LPKA, sehingga jika guru dari sekolah induk berhalangan hadir guru dari LPKA dapat mengatikkannya sehingga kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik.

5.3.4. Sekolah Induk

Sekolah induk yang telah ditunjuk langsung oleh dinas pendidikan jawabarat sebaiknya lebih bertanggung jawab terhadap pendidikan anak didik permasyarakatan di LPKA, tenaga pendidik seharusnya datang sesuai jadwal yang ditetapkan, dan apabila berkendala hadir dapat mencari pengganti untuk memberikan pengajaran untuk anak didik permasyarakatan, karena ank didik permsyarakatan tidak dapat belajar maupun kelaur dati BLOK untuk belajar mandiri tanpa kehadiran tenaga pendidik, sehingga peran tenaga pendidik sangat begar untuk membatu anak didik permasyarakatan mendapatkan pendidikan yang layak.

5.3.5. Anak Didik Permasyarakatan

Diharapkan dengan diberikannya pendidikan formal anak didik permasyarakatan dapat memanfaatkan dengan semaksimal mungkin, baik pada saat pelaksanaan pendidikan di LPKA, maupun saat sudah bebas, sehingga tujuan utama diberikannya pendidikan ini dapat terwujud dengan baik.

5.3.6. Peneliti Selanjutnya

Banyak bahan kajian yang dapat diangkat sebagai sebuah penelitian dari penyelenggaraan pendidikan formal di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bandung. Berdasarkan pengamatan peneliti, rekomendasi bagi peneliti selanjutnya adalah mengkai mengenai pola adaptasi anak diidk permasyarakatan terhadap pembinaan-pembinaan di LPKA, serta pengintegrasian pendidikan formal di LPKA bagi mantan tahanan anak.

